

ANALISIS KINERJA GAPOKTAN SETIA DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

**(Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan Desa Oelekam, Kecamatan Mollo
Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan)**

ANALYSIS OF GAPOKTAN SETIA'S PERFORMANCE IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT

***(Case Study of Community Forest in Oelekam Village, Mollo Tengah District,
South Central Timor Regency)***

Erivaldi Dangu Uba¹⁾, Ludji Michael Riwu Kaho²⁾, Astin Elise Mau³⁾, Roni Haposan Sipayung⁴⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

²⁾ Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

³⁾ Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

⁴⁾ Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana

*Email: erivaldidangu@gmail.com

ABSTRACT

Community Forestry (HKm) is a government program designed to promote sustainable forest management by actively involving local communities in forest conservation and utilization. Oelekam Village is one of the villages granted a Community Forestry Management Permit (IUPHKm). Institutional capacity plays a crucial role in determining the success of community forestry management. This study aimed to evaluate the institutional performance of Gapoktan Setia and assess the impact of Community Forestry on vegetation composition. Institutional performance data were collected through interviews and structured questionnaires, while vegetation composition was analyzed using the transect method. Institutional performance was evaluated using a Likert scale. The results indicate that the implementation of the Community Forestry program has positively influenced vegetation composition, as reflected by an increase in tree cover between 2015 and 2021. However, institutional performance remains suboptimal and requires significant improvement to enhance the effectiveness of Community Forestry for both local communities and forest sustainability. The institutional assessment revealed that Gapoktan Setia performed poorly across four key indicators: rights (2.04), responsibilities (2.04), benefits (2.13), and relationships (2.12), all of which were categorized as poor. The main factors limiting institutional development include the absence of clear work area allocation among members, low member participation and awareness, limited deliberative decision-making, an aging membership, low educational attainment, and inadequate facilities and infrastructure. Vegetation analysis further identified several tree species with high development potential, including tamarind (*Tamarindus indica*), candlenut (*Aleurites moluccana*), avocado (*Persea americana*), and kassod tree (*Senna siamea*).

Keywords: community forestry, institutional performance, gapoktan, vegetation composition, likert scale.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. HKm memberikan peluang kepada masyarakat serta menjawab ketidakpastian tenurial atas kawasan hutan dengan memenuhi syarat-syarat yakni kejelasan batas wilayah yang terdefinisi, kejelasan status sosial masyarakat, ketergantungan terhadap SDA, legalisasi dari sistem pengelolaan, pengelolaan yang sederhana dan mudah diimplementasikan, koordinasi, sinkronisasi, serta keterpaduan pengelolaan antar *stakeholder* (Pradityo, 2016; Rusadi, 2021). Salah satu bagian penting dalam pengelolaan HKm adalah peran kelembagaan. Kelembagaan dapat diartikan sebagai perangkat lunak, aturan main, keteladanan, rasa percaya, serta konsistensi kebijakan yang diterapkan di dalamnya (Sari *et al.*, 2013; Rubynski *et al.*, 2018). Kelembagaan adalah salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pengelolaan hutan bersama masyarakat (Hamzah *et al.*, 2015 dalam Rubynski *et al.*, 2018). Desa Oelekam yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan salah satu Desa yang masyarakatnya terlibat dalam program HKm yaitu Gapoktan Setia. Berdasarkan SK 8758./MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 pemberian izin usaha HKm kepada Gapoktan Setia seluas ± 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) hektar pada kawasan Hutan Mutis Timau dengan fungsi produksi terbatas. Jenis usahanya antara lain budidaya tanaman MPTS, serta Komoditi usahanya berupa Jeruk, kopi, alpukat dan ternak sapi.

Jauh sebelum tahun 2018 Masyarakat di Desa Oelekam telah melakukan berbagai aktivitas dalam hutan yang berpotensi

merusak hutan. Masyarakat Desa Oelekam telah melakukan pemanenan hasil hutan, baik itu pemanenan hasil hutan bukan kayu maupun pemanenan hasil hutan kayu. Tidak hanya itu sering terjadinya kasus kebakaran hutan di Desa Oelekam dapat menyebabkan penurunan fungsi hutan di Desa tersebut.

Analisis kelembagaan Gapoktan Setia menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas, karena adanya fakta yang ditemukan bahwa kelembagaan ini mengalami berbagai tantangan. Salah satu masalah yang ditemukan adalah belum adanya pembagian areal kerja bagi masing-masing anggota. Hal ini menjadi penting untuk dibahas, mengingat bahwa pembagian areal kerja merupakan salah satu langkah penting dalam menjalani program HKm, karena tanpa adanya pembagian areal kerja tentu berpotensi pada pengelolaan lahan yang kurang maksimal. Tidak hanya itu, hal ini berpotensi menyebabkan adanya konflik antara anggota karena tidak adanya kejelasan terkait kepemilikan lahan kelola HKm. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Gapoktan Setia Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan**”.

2. METODOLOGI

2.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di HKm Desa Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Januari 2023 - September 2023.

2.2 Alat Dan Bahan

Alat yang digunakan adalah alat Tulis, Kamera, Laptop, Perekam Suara, *Tally sheet*, Haga meter, Meter rol, Aplikasi pengenalan tumbuhan, Buku panduan lapangan dan Tali Rafiah. Sedangkan bahan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

2.3 Pengumpulan Data

Jenis data yang di kumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dicari adalah kinerja kelembagaan, dan komposisi vegetasi pada lahan IUPHKm Gapoktan Setia. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu pengumpulan data-data teknis dari Instansi UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui penyuluh yang bertugas di Desa Oelekam.

Responden ditentukan dengan menggunakan *snowball sampling* atau metode pengambilan ilustrasi bola salju. Dimana sampel diperoleh secara bergulir lewat satu responden buat memperoleh responden berikutnya. Ciri ilustrasi awal diseleksi dari orang ataupun kelompok yang menampilkan sikap cocok dengan tujuan riset (Lenaini, 2021). Dalam penelitian ini yang akan diambil sebagai sampel adalah pengurus inti dari Gapoktan Setia dan anggota yang dianggap dapat memberikan informasi, serta *stakeholder* lainnya seperti lembaga Desa dan pegawai UPT KPH. Pengambilan data vegetasi dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah lahan tempat Masyarakat melakukan aktivitas pengelolaan hutan. Plot diletakkan dengan menggunakan garis transek dengan panjang 100 m dan jarak antara garis transek adalah 100 m. Garis transek diletakkan pada tiga buah jalur yang telah ditentukan dengan radius masing-masing jalur adalah 1 km.

2.4 Analisis Data

2.4.1 Analisis Stakeholder

Peranan pihak pemangku kebijakan (*stakeholders*) dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dianalisis dengan menggunakan analisis *stakeholder* dimana salah satu bagian dari analisis tersebut terdapat suatu metode pendekatan yang disebut kerangka 4R (*Rights, Responsibilities, Revenue/returns, Relationship*) yang membagi *stakeholder* menurut hak, tanggung jawab, manfaat yang diterima, serta hubungan diantara masing-masing pihak tersebut (Wollenberg *et al.*, 2005). Perhitungan mengenai analisis *stakeholder* dan kinerja kelembagaan mengadopsi model perhitungan skala likert dengan gradasi 1 sampai 4 dimana; 1= Kurang Baik, 2= Cukup Baik, 3= Baik dan 4= Sangat Baik.

Menurut Endar (2000); Latifah *et al.*, (2015), skala Likert ini merupakan alat untuk mengukur sikap dari keadaan yang sangat positif ke jenjang yang sangat negatif, untuk menunjukkan sejauh mana tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya nilai setiap responden dijumlahkan dan dibuat pemeringkatan dengan skala penilaian sebagai berikut:

Selisih per kategori

$$= \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{jumlah kategori}} \quad (I)$$

$$\frac{4 - 1}{4}$$

Selisih per kategori = 0,75

Selisih per kategori = 0,75

Berdasarkan rumus diatas, Menurut (Yudhiantari, 2002; Latifah *et al.*, 2015) dapat dilihat tingkat nilainya masing-masing seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Skala Sikap Masyarakat

No	Skala Sikap Analisis Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		
	Sikap	Skor	Kategori
1	Sangat baik	4	3,75– 4,50
2	Baik	3	3,00 - 3,74
3	Cukup	2	2,25 –2,99
4	Kurang baik	1	1,50 – 2,24

Sumber: Hasil modifikasi Skala Likert (Yudhiantari, 2002)

Cara mendapatkan persentase

= Jumlah Orang/ Jumlah Responden x 100

Cara mendapatkan total skor

=Jumlah orang x skor nilai

Cara mendapatkan kategori

= Jumlah Total Skor/ Jumlah Responden

e. Dominasi Suatu Jenis

$$D = \frac{\text{Luas bidang dasar suatu jenis}}{\text{Luas petak contoh}}$$

f. Dominasi Relatif Suatu Jenis (DR)

$$DR = \frac{\text{Dominansi suatu jenis}}{\text{Dominansi seluruh spesies}} \times 100\%$$

g. Indeks Nilai Penting (INP)

$$INP = KR + FR + DR$$

Keterangan

INP : Indeks nilai penting

KR : Kerapatan relatif

FR : Frekuensi relatif

DR : Dominansi relatif

2.4.2 Analisis Vegetasi

Data yang telah dikumpulkan, dilakukan penghitungan untuk analisis terhadap kerapatan dan kerapatan relatif, frekuensi dan frekuensi relatif, luas bidang dasar (LBD), dominasi dan dominasi relatif, serta indeks nilai penting (INP) (Saharjo & Nurhayati, 2006). Persamaan yang digunakan dalam perhitungan mengacu pada (Onrizal *et al.*, 2005; Cahyanto *et al.*, 2014), sebagai berikut:

a. Kerapatan Suatu Jenis (K)

$$K = \frac{\text{Jumlah individu suatu jenis}}{\text{Luas petak contoh}}$$

b. Kerapatan Relatif Suatu Jenis (KR)

$$KR = \frac{\text{Kerapatan suatu jenis}}{\text{Kerapatan seluruh jenis}} \times 100 \%$$

c. Frekuensi Suatu Jenis (F)

$$F = \frac{\text{Jumlah sub petak ditemukan suatu jenis}}{\text{Seluruh sub petak contoh}}$$

d. Frekuensi Relatif Suatu Jenis (FR)

$$FR = \frac{\text{Frekuensi suatu jenis}}{\text{Frekuensi seluruh jenis}} \times 100\%$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian

Secara administratif Desa Oelekam merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini mempunyai luas wilayah sekitar 12.000 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1441 jiwa.

3.2 Sejarah HKm Oelekam

Program HKm pertama kali muncul di Desa Oelekam sejak tahun 1997 yang dikelola oleh PT Fendi Lestari. Program tersebut dilaksanakan hingga selesai masa kontraknya. Kemudian sejak berakhirnya kontrak dari PT Fendi Lestari pengelolaan hutan dilanjutkan oleh masyarakat setempat. Pada umumnya masyarakat Desa Oelekam

bermukim dalam kawasan hutan, sehingga hal itu juga mendasari Masyarakat melakukan berbagai kegiatan dalam hutan sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan. Melihat fakta tersebut, KPH Wilayah Timor Tengah Selatan melakukan berbagai upaya untuk menjaga hutan tetap lestari.

Berdasarkan Surat Permohonan: 01/GKS OELEKAM/1/2018 tanggal 10 maret 2018, Gapoktan Setia mengajukan permohonan IUPHKm seluas $\pm$ 385 ha di Desa Oelekam Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian berdasarkan berita acara verifikasi teknis nomor: 683/X-2/BPSKL.0/10/2018 tanggal 18 oktober 2018, terdapat pengurangan seluas $\pm$ 47 ha karena penyesuaian batas kawasan hutan dan batas administratif Desa sehingga calon areal kerja yang direkomendasikan untuk dilanjutkan proses penerbitan IUPHKm seluas $\pm$ 338 ha pada

kawasan hutan produksi terbatas di Desa Oelekam.

Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan baru diperoleh pada tanggal 27 desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8758/MENLHK-PSKL/PSL.0/12/2018 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada Gapoktan Setia seluas $\pm$ 338 ha pada kawasan hutan produksi di Desa Oelekam Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.3 Gambaran Umum HKm Oelekam

Hutan kemasyarakatan Oelekam sendiri terbagi kedalam hutan sekunder seluas 138 ha, lahan terbuka 80 ha dan pertanian lahan kering 120 ha. HKm Oelekam sendiri berada pada ketinggian 900 mdpl dengan rincian topografi dan kelerengan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Topografi Dan Kelerengan

No	Kelas Kelerengan	Kelerengan (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
1	Datar (A)	0 – 8	0	0
2	Landai (B)	9 – 15	0,25	3,63 %
3	Agak curam (C)	16 – 25	310	91,47%
4	Curam (D)	26 – 40	20	1,51 %
5	Sangat curam (E)	40	7	0

Sumber: data primer setelah diolah, 2023

Pada umumnya vegetasi di HKm Oelekam didominasi oleh pohon dominan seperti Gum Putih (*Eucalyptus alba*), Cemara (*Casuarina* sp.), Johar (*Senna siamea*) dan Akasia (*Acacia mangium*). Terdapat pohon lain yang sering dijumpai yaitu Kemiri (*Aleurites moluccana*), Asam (*Tamarindus indica*), Alpukat (*Persea americana*), dan Kabisak (*Acacia leucophloea*).

3.4 Sistem Pengelolaan HKm Oelekam

Masyarakat pengelola HKm Oelekam pada umumnya masih mengelola kawasan secara sederhana atau tradisional dengan mengembangkan bentuk pertanian campuran yang melibatkan dua jenis atau lebih tanaman dalam satu areal lahan. Sistem pertanian berganda atau tumpang sari adalah definisi umum dari semua pola pertanian yang melibatkan penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada suatu hamparan lahan (Permanasari & Kastono, 2012). HKm Oelekam sendiri ditanami tanaman kayu, tanaman pangan, tanaman

perkebunan, dan tanaman hortikultura. Tanaman kayu didominasi oleh Kemiri (*Aleurites moluccana*) dan Alpukat (*Persea americana*), tanaman pangan didominasi oleh Jagung (*Zea mays*) dan Singkong (*Manihot esculenta*), sedangkan tanaman hortikultura masyarakat lebih dominan menanam sayur Labu Siam (*Sechium edule*).

3.5 Karakteristik Responden

3.5.1 Umur Responden

Umur responden yang dimaksud pada penelitian ini adalah usia produktif muda, usia produktif tua dan usia non produktif. Berdasarkan hasil penelitian, responden termuda dari ketiga KTH yang dijadikan sampel penelitian adalah usia 30 tahun dan tertua usia 85 tahun. Penggolongan umur 15-35 tahun dikategorikan usia produktif muda, umur 36-55 tahun dikategorikan sebagai usia produktif tua, dan usia non produktif diatas umur 56 tahun (Hasanuddin, 2011).

Anggota KTH yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh usia produktif tua sebesar 60 %, usia non produktif 33% dan usia produktif muda 7%. Usia sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang. Usia yang masih dalam masa produktif biasanya memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang sudah berusia tua sehingga fisik yang dimiliki menjadi lemah dan terbatas (Mahendra & Woyanti, 2014; Parengkuan, 2019).

3.5.2 pendidikan responden

Pendidikan sangat menentukan tingkat kemampuan petani dalam melakukan kegiatan pertanian (Manyamsari & Mujiburrahmad, 2014; Dewi *et al.*, 2018). Pendidikan yang rendah, selain berdampak pada kurang terkoordinirnya perencanaan pertanian, juga akan berpengaruh pada jenis

pekerjaan lain yang dapat dilakukan oleh petani dalam upaya peningkatan pendapatan.

Tingkat pendidikan responden dari gabungan KTH tersebut didominasi oleh responden tidak sekolah sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 37 %. Terdapat pula responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 6 orang, responden dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 6 orang dan Responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 7 orang. Rendahnya tingkat pendidikan petani HKm berimplikasi terhadap rendahnya serapan petani HKm terhadap adopsi informasi dan teknologi (Takwim *et al.*, 2016).

3.6 Analisis Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

3.6.1 Hak Kelembagaan Kelompok Tani Hutan di HKm Oelekam

Penguatan kelompok tani ialah hal yang sangat penting karena merupakan salah satu kunci keberhasilan HKm (Sanudin *et al.*, 2016; Dewi *et al.*, 2018). Terbatasnya peran kelompok dalam memfasilitasi proses “belajar” tidak lepas dari beberapa faktor antara lain masih terbatasnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak terkait, termasuk pengelola HKm terhadap kelompok dan kesadaran anggota terhadap kelompok rendah (Muktasam, 2004).

Berdasarkan hasil perhitungan total skor keseluruhan dari Gapoktan Setia adalah 61,2. Sehingga kategori yang diperoleh dari total keseluruhan jawaban responden adalah kurang baik dengan skor sebesar 2,04. Responden membenarkan bahwa adanya hak akses kelembagaan KTH di HKm Oelekam dan disambut baik/positif oleh masyarakat. Namun hak pembinaan dan berpendapat yang diperoleh oleh anggota KTH belum sepenuhnya berpengaruh terhadap kualitas kelembagaan KTH. Belum adanya kepastian pengelolaan lahan HKm menjadi salah satu indikator penting yang mempengaruhi

pendapat kelompok terhadap hak yang diperoleh.

3.6.2 Tanggung Jawab Kelembagaan Kelompok Tani Hutan di HKm Oelekam

Berdasarkan hasil perhitungan, total skor jawaban dari KTH Kuafeu sebesar 23, total skor jawaban KTH Besak sebesar 19,67 dan total skor jawaban KTH Netmetan sebesar 18,5. Total skor keseluruhan dari jawaban ketiga KTH tersebut adalah 61,17. Berdasarkan hasil perhitungan dengan skala likert tanggung jawab ketiga kelompok ini dikategorikan kurang baik dengan skor 2,04. Belum adanya kepastian areal kerja bagi masing-masing anggota merupakan tantangan terbesar anggota KTH dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan HKm.

Gapoktan Setia belum melakukan pembagian areal kerja bagi masing-masing anggota KTH sehingga pengelolanya belum optimal. Masyarakat di HKm Oelekam telah melakukan kegiatan dalam hutan namun ada ketidakadilan dalam penggunaan lahan yang disebabkan oleh belum adanya areal kerja. Sebagian masyarakat masih melakukan pembukaan lahan dengan tebas bakar dan hal ini yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran lahan, dan sebagian masyarakat masih membiarkan ternaknya secara bebas dalam kawasan sehingga merusak tanaman dalam kawasan. Roger & Shoemaker (1987), mengemukakan bahwa program pembangunan menjadi efektif pada kondisi adanya dukungan dari pemimpin masyarakat lokal dan organisasi baik yang bersifat publik maupun privat. Akibat belum adanya pembagian areal kerja, konflik perebutan lahan kadang harus dirasakan masyarakat yang ingin mengelola hutan.

Dinamika keaktifan kelompok tani hutan masih terbilang rendah, akibat struktur kelompok yang didominasi oleh anggota golongan usia produktif tua bahkan non produktif sehingga berpengaruh pada

pengambilan keputusan dalam kelompok. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya kemampuan anggota KTH dalam memahami kebijakan-kebijakan yang berlaku dan kurang memperhatikan kebutuhan kelompok yang berorientasi pada kesejahteraan kelompok.

3.6.3 Hasil/Manfaat Kelompok Tani Hutan di HKm Oelekam

HKm memberikan peluang kepada masyarakat serta menjawab ketidakpastian tenurial atas kawasan hutan dengan memenuhi syarat-syarat yakni kejelasan batas wilayah yang terdefinisi, kejelasan status sosial masyarakat, ketergantungan terhadap SDA, legalisasi dari sistem pengelolaan, pengelolaan yang sederhana dan mudah diimplementasikan, koordinasi, sinkronisasi, serta keterpaduan pengelolaan antar *stakeholder* (Pradityo 2016; Rusadi, 2021).

Berdasarkan hasil perhitungan, total skor jawaban dari KTH Kuafeu terhadap hasil yang terima sebesar 23,75, total skor jawaban KTH Besak sebesar 22 dan total skor jawaban KTH Netmetan sebesar 18,25. Total skor keseluruhan dari jawaban ketiga KTH tersebut adalah 64. Berdasarkan perhitungan menggunakan skala likert hasil yang diperoleh ketiga kelompok ini dikategorikan kurang baik dengan skor 2,13. Manfaat yang didapatkan anggota KTH terbilang rendah karena Anggota KTH belum mengelola HKm dengan optimal.

Masyarakat belum dibekali dengan visi yang kuat dalam mengelola hutan, hutan hanya dijadikan media pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Umumnya hasil panen masyarakat tidak dijual namun dijadikan sebagai bahan konsumsi dalam keluarga. Hal ini senada dengan pendapat Maryudi *et al.*, 2012; Dewi *et al.*, 2018, bahwa hasil pertanian pangan yang dilaksanakan di lahan HKm hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan subsisten.

Kurangnya sarana prasarana, infrastruktur pendukung, akses jalan yang belum memadai dan jarak dari kota yang cukup jauh menjadi tantangan nyata bagi kelompok dalam meningkatkan kualitas pengelolaan HKm. Disisi lain belum adanya kepastian areal kerja menjadi hambatan bagi anggota dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan HKm.

3.6.4 Hubungan Kelompok Tani Hutan Di HKm Olekam

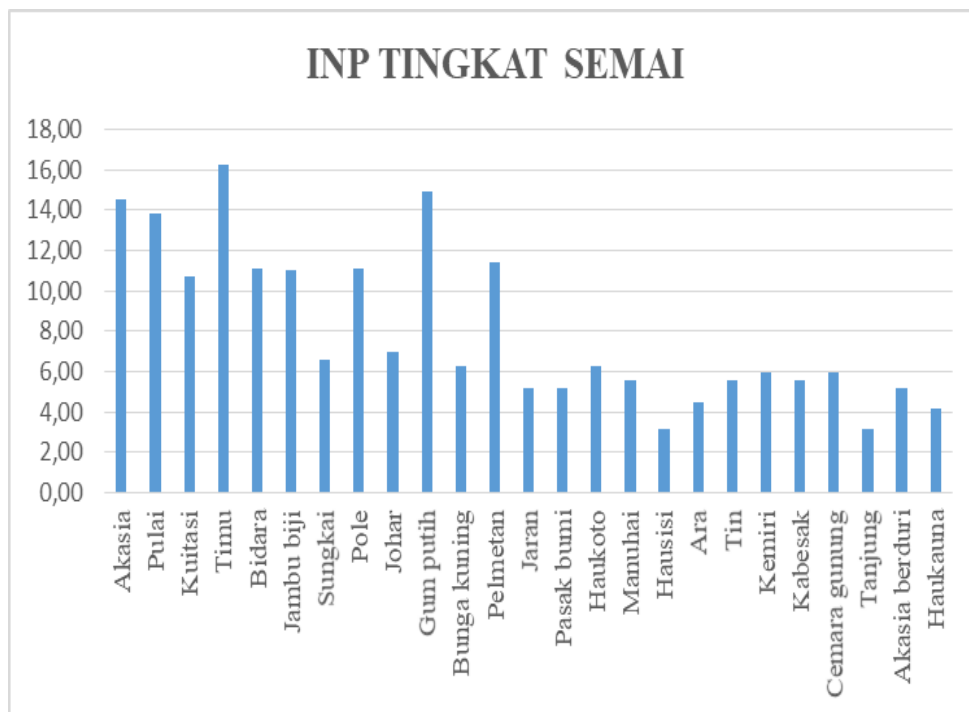
Berdasarkan hasil perhitungan, total skor jawaban responden KTH Kuafeu sebesar 22,67, total skor KTH Besak sebesar 21,33 dan total skor KTH Netmetan sebesar 19,67. Hasil perhitungan menggunakan skala likert menunjukkan hubungan Gapoktan Setia masuk dalam kategori kurang baik dengan skor 2,12. Kurangnya musyawarah bersama menjadi salah satu faktor yang menjadikan hubungan dalam KTH belum baik. Anggota kelompok dan KPH belum sejalan akibat lemahnya

kerjasama dan koordinasi antara kelompok dengan KPH. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Safe'i *et al.*, (2018), bahwa Kelompok tani merupakan sebuah kelembagaan petani yang secara langsung berperan dalam kegiatannya mengembangkan unit usaha secara bersama dan di dalamnya terjadi interaksi dan koordinasi antar anggota sehingga tujuan bersama akan cepat tercapai.

Tanggung jawab yang dijalankan pihak UPT KPH dalam mengatasi masalah kurang optimal akibat terbatasnya jumlah dan kemampuan petugas lapangan, terbatasnya dana untuk pembinaan serta beberapa masyarakat yang masih bersikap apatis dalam menjalankan perannya. Beberapa hubungan yang kurang harmonis di antara *stakeholder* yang menjadi hambatan dalam pengelolaan HKm.

3.7 Struktur Dan Komposisi Vegetasi Hutan Kemasyarakatan Olekam

3.7.1 Analisis Vegetasi Tingkat Semai

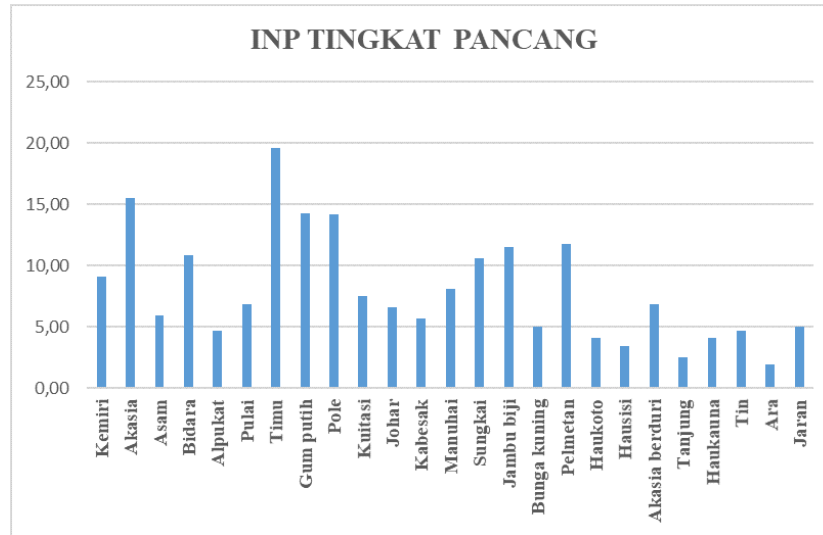


Gambar 1. Diagram INP Tingkat Semai

Komposisi vegetasi tingkat semai di hutan kemasyarakatan Oelekam memiliki 25 jenis tumbuhan. Kawasan ini didominasi oleh Gum Putih (*Eucalyptus alba*) dengan tingkat kerapatan relatif 6,67, frekuensi

relatif 8,22 dan INP sebesar 14,89. Sedangkan Tanjung (*Mimusops elengi*) merupakan jenis dengan INP terendah sebesar 3,12.

3.7.2 Analisis Vegetasi Tingkat Pancang

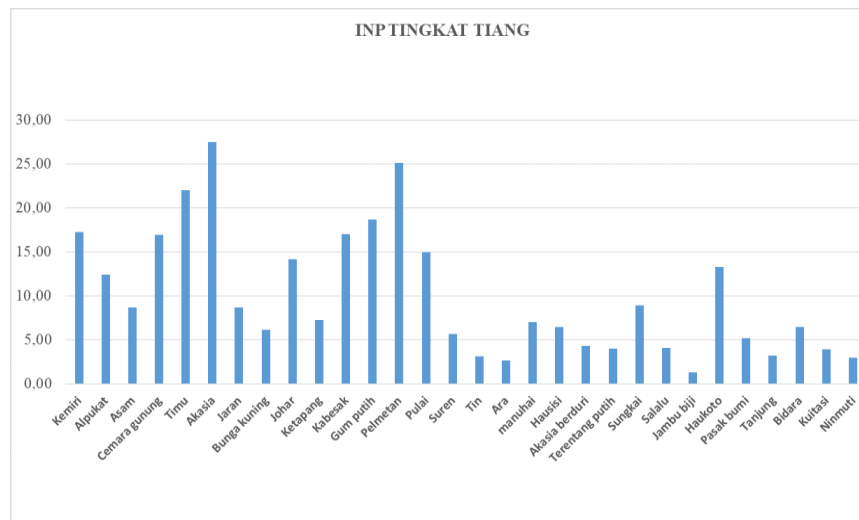


Gambar 2. Diagram INP Tingkat Pancang

Komposisi vegetasi tingkat pancang di hutan kemasyarakatan Oelekam memiliki 26 jenis tumbuhan. Kawasan ini didominasi oleh Timu (*Timonius timu*) dengan tingkat kerapatan relatif 7,10, frekuensi relatif 13,17 dan INP sebesar 19,63. Sedangkan Ara

(*Ficus benjamina*) merupakan jenis dengan INP terendah sebesar 1,89.

3.7.3 Analisis Vegetasi Tingkat Tiang

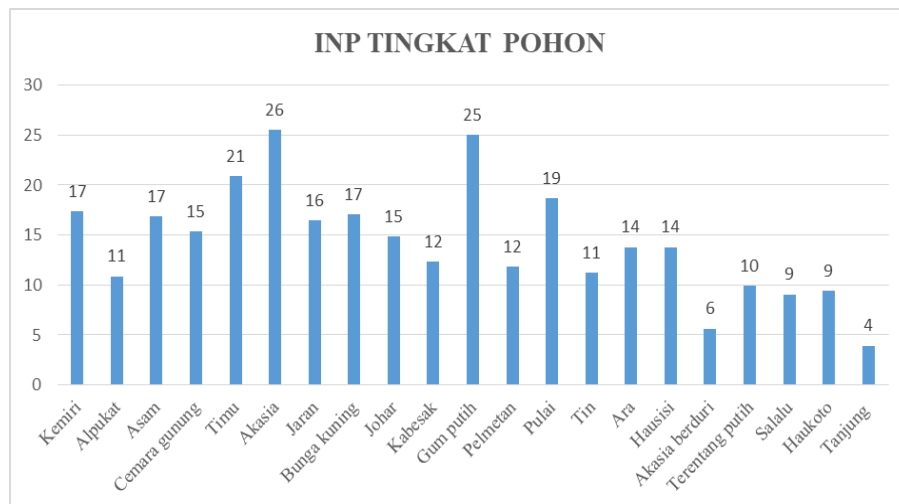


Gambar 3. Diagram INP Tingkat Tiang

Komposisi vegetasi tingkat tiang di hutan kemasyarakatan Oelekam terdapat 31 jenis tumbuhan. Kawasan ini didominasi oleh Kemiri (*Aleurites moluccana*) dengan tingkat kerapatan relatif 5,91, frekuensi

relatif 4,95, dominasi relatif 6,45 dan INP sebesar 17,3. Sedangkan Jambu biji (*Psidium guajava*) merupakan jenis dengan INP terendah sebesar 1,35.

3.7.4 Analisis Vegetasi Tingkat Pohon



Gambar 4. Diagram INP Tingkat Pohon

Dari gambar diagram diatas dapat diketahui bahwa, Komposisi vegetasi tingkat pohon di hutan kemasyarakatan Oelekam terdapat 28 jenis tumbuhan. Kawasan ini didominasi oleh Akasia (*Acacia mangium*) dengan tingkat kerapatan relatif 10,58, frekuensi relatif 10,61, dominasi relatif 4,55 dan INP sebesar 25,75. Sedangkan pohon tanjung (*Mimusops elengi*) merupakan jenis dengan INP terendah sebesar 3,91.

4. Kesimpulan Dan Saran

4.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kelembagaan Gapoktan Setia belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai oleh beberapa kendala utama, yaitu kurangnya pembinaan dan musyawarah bersama, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya

manusia (SDM), serta minimnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan hutan. Selain itu, belum adanya pembagian areal kerja juga menjadi hambatan bagi anggota KTH dalam melaksanakan pengelolaan hutan secara efektif.

2. Berdasarkan analisis menggunakan perangkat lunak QGIS, terjadi peningkatan komposisi vegetasi dan penurunan area savana pada periode 2015–2021 di lokasi IUPHKm. Kondisi ini sejalan dengan diperolehnya IUPHKm oleh Desa Oelekam pada tahun 2018, yang mengindikasikan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan hutan. Namun demikian, perubahan tersebut belum signifikan, karena di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan HKM. Salah satu kendala utama adalah belum adanya pembagian areal kerja kepada masing-masing anggota kelompok.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa HKm telah memberikan dampak positif, namun masih diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, pengelolaan kawasan, dan pengembangan usaha agar hasil yang diperoleh lebih optimal dan signifikan.

4.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Intensitas pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat perlu ditingkatkan, serta pemerintah diharapkan lebih aktif dalam memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap berbagai tantangan dalam pengelolaan hutan.
2. Diperlukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap perkembangan tata kelola kelembagaan kelompok agar kinerja dapat terus ditingkatkan.
3. Keterlibatan seluruh anggota kelompok dalam setiap pertemuan wajib dioptimalkan agar seluruh anggota memperoleh pemahaman yang sama terkait informasi dan kebijakan yang disampaikan.
4. Keterlibatan stakeholder lokal, seperti pemerintah desa dan lembaga desa, perlu diperkuat agar dapat berperan dalam fungsi pengamanan dan pengawasan hutan melalui kebijakan atau aturan formal.
5. Pembagian areal kerja kepada masing-masing anggota perlu segera direalisasikan agar pengelolaan HKm dapat dilakukan secara lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat maupun kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Cahyanto, T., Chairunnisa, D., & Sudjarwo, T. 2014. Analisis Vegetasi Pohon Hutan Alam Gunung Manglayang Kabupaten Bandung. *Jurnal Istek*,

8(2) : 145–161.

Dewi, I. N., Awang, S. A., Andayani, W., & Suryanto, P. 2018. Karakteristik Petani Dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Terhadap Pendapatan Petani Di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, **12(1)** : 86-98.

Endar, S. 2000. *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Latifah, S., Manalu, B. E., & Patana, P. (2013). Persepsi Masyarakat terhadap Pengembangan Ekowisata di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. *Peronema Forestry Science Journal*, **2(1)** : 54–64.

Hasanuddin. 2011. Tingkat Ketergantungan Masyarakat Desa Labuaja Terhadap Zona Tradisional Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, **6(2)**: 101–110.

Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, **6(1)**: 33–39.

Mahendra, A. D. 2014. “Analisis pengaruh pendidikan, upah, jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja terhadap produktivitas tenaga kerja (Studi di industri kecil tempe di Kota Semarang)” (Skripsi). Semarang : Universitas Diponegoro.

Manyamsari, I., & Mujiburrahmad. 2014. Karakteristik petani dan hubungannya dengan kompetensi petani lahan sempit (Kasus: Di Desa Sinar Sari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Jawa Barat). *Jurnal Agrisep*, **15(2)**: 58–74.

Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M.,

- Aurenhammer, H., Rotchanaphatharawit, R., & Krott, M. 2012. *Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. Forest Policy and Economics*, **14(1)**: 1–5.
- Muktasam. 2004. Analisis sosial dan kelembagaan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) di Batukliang Utara–Lombok Tengah. *Jurnal Agrimansion*, **4(2)**: 168–183.
- Onrizal, Kusmana, C., Suharjo, B. H., Handayani, I. P., & Kato, T. 2005. Analisis Vegetasi Hutan Tropika Dataran Rendah Sekunder Di Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan Barat. *Jurnal Biologi*, **4(6)**: 359—372.
- Parengkuan, E. A. 2019. Produktivitas kerja yang dilihat dari faktor usia dan pengalaman kerja. *Jurnal Manajemen STEI*, **2(2)**: 145–153.
- Pradityo, R. 2016. Hutan Kemasyarakatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan. *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, **2(2)**: 256–260.
- Rubynski, N. P., Wulandari, C., Herwanti, S., & Febryano, I. G. 2018. Peran Kelembagaan Nagari Dalam Pengelolaan Hutan Di Nagari Sirukam Kabupaten Solok. *Gorontalo Journal Of Forestry Research*, **1(2)**: 30–39.
- Rusadi, N. 2021. “Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial Dengan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba” (thesis). Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Sanudin, Awang, S. A., Sadono, R., & Purwanto, Dan R. H. 2016. Perkembangan Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, **23(2)**: 276–283.
- Sari, N., Golar, & Toknok, B. 2013. Kelembagaan kelompok tani hutan program pendampingan SCBFWM di sekitar Sub Daerah Aliran Sungai Miu (Kasus Desa Pakuli Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi). *Warta Rimba*, **1(1)**: 9–16.
- Rogers, E. M., & Shoemaker, F. F. 1987. *Memasyarakatkan ide-ide baru*. 4rd Ed. Surabaya: Usaha Nasional.
- Takwim, A. A., Markum, & Latifah, S. 2016. Efektivitas pengelolaan hutan kemasyarakatan pada berbagai luasan lahan di Santong, Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ekosains*, **8(2)**: 1–7.
- Wollenberg, E., Anderson, J., & López, C. (2005). *Though all things differ: Pluralism as a basis for cooperation in forests*. Bogor, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Yudhiantari, L. P. E. (2002). “*Ekowisata sebagai alternatif dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan–Bali*” (thesis). Semarang: Universitas Diponegoro.